

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bantul

a. Letak Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantul terletak di antara $07^{\circ} 44' 04'' - 08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, disebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan disebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

b. Pembagian Administratif

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan yang dibagi menjadi 75 Desa dan 935 Dusun. Pembagian administrasi dan

1. Kecamatan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1. Desa-desanya di

Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan dan desa perkotaan.

Tabel 1.
Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km ²)
1	Banguntapan	8	58	24,48
2	Jetis	4	64	24,47
3	Pleret	5	47	22,97
4	Bambanglipuro	3	45	22,70
5	Sewon	4	63	27,16
6	Imogiri	8	72	54,49
7	Kretek	5	52	26,77
8	Sanden	4	62	23,16
9	Srandakan	2	43	18,32
10	Sedayu	4	54	34,36
11	Pandak	4	49	24,30
12	Pajangan	3	55	33,25
13	Kasih	4	53	32,38
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Bantul	5	50	21,95
16	Pundong	3	49	23,68
17	Dlingo	6	59	55,87
Jumlah		75	935	506,85

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan dusun yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 dusun. Berdasarkan RDTRK dan Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa/kelurahan dapat dipisahkan sebagai desa/kelurahan

c. Keadaan Penduduk Demografis.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk disuatu daerah. Kepadatan penduduk geografis di kabupaten Bantul secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2
Kepadatan Penduduk Geografis Per Kecamatan
Di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Srandakan	18.32	34.484	0.09	1.931
2	Sanden	23.18	37.562	0.13	1.629
3	Kretek	28.77	34.895	0.11	1.348
4	Pundong	23.88	41.810	0.05	1.810
5	Bambanglipuro	22.70	47.158	0.08	2.084
6	Pandak	24.30	56.240	0.07	2.343
7	Pajangan	33.25	35.183	0.15	1.608
8	Bantul	21.85	68.282	0.09	2.884
9	Jetis	24.47	61.284	0.07	1.145
10	Imogiri	54.49	67.903	0.15	1.252
11	Dlingo	55.87	42.975	0.08	1.931
12	Banguntapan	28.48	112.868	0.08	3.513
13	Pleret	22.87	53.729	0.05	1.997
14	Piyungan	32.54	53.149	0.09	2.045
15	Sewon	27.16	104.323	0.03	3.344
16	Kasih	32.38	108.281	0.01	3.334
17	Sedayu	34.36	49.990	0.02	1.484
	Total	508.85	1.010.882	1.28	35.68

Sumber: Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyebaran penduduk

di Kabupaten Bantul yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi terletak

Fungsi Bappeda adalah:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas atau satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program Pembangunan Daerah;
- e. Verifikasi rencana program/proyek pembangunan Daerah, penyusunan laporan, evaluasi dan data pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bupati.

Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Bantul

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mencanangkan visi seperti yang terdapat dalam Renstra SKPD Bappeda 2006 – 2010 adalah sebagai berikut: Terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Yang Responsif, Antisipatif, Handal Dan Mampu Mempercepat

2. Misi

- a. Merumuskan kebijakan umum dan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, sektor, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Merumuskan Dokumen Rencana dan Proposal Teknis dalam mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mewujudkan sinergisme koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. Merumuskan kebijakan dan prioritasasi program melalui verifikasi yang terencana, responsive, transparan dan akuntabel.

Kebijakan Bappeda Kabupaten Bantul

- 1) Mengupayakan sistem kerja dalam sebuah kelembagaan yang teratur dan didukung oleh sarana prasarana serta SDM yang berkualitas;
- 2) Menyediakan data dan informasi yang akurat berbasis teknologi informasi beserta teknik analisisnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana;
- 3) Menyediakan rencana perbaikan kualitas kehidupan masyarakat

- 4) Mengkoordinasikan baik internal maupun eksternal dalam rangka implementasi rencana serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana;
- 5) Menyusun laporan hasil implementasi rencana secara terstruktur, sistematis, dan benar;
- 6) Melaksanakan penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan pembangunan;
- 7) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin kelestarian lingkungan.

Kebijakan Bappeda Bantul dalam pembangunan kawasan Pantai Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Bantul

Bappeda Kabupaten Bantul dalam penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pantai selatan Bantul, dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam ruang kawasan Pantai Selatan Bantul untuk menjaga sinergisitas kegiatan yang ada.

Tujuan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Pantai Selatan Bantu, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Peningkatan nilai ruang secara proporsional;
- c. Pencegahan benturan kepentingan pemanfaatan ruang dengan

- d. Tercapainya kualitas ruang yang aman, tertib, lancar dan sehat.

Untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut di atas dirumuskan tujuan khusus perencanaan yang merupakan tujuan lebih terperinci yang ditetapkan berdasarkan karakteristik wilayah perencanaan dan tujuan umum yang hendak dicapai. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ekonomi, meningkatkan kemampuan pelayanan jasa dan distribusi barang ke pusat pengembangan wilayah yang ada dekatnya, meningkatkan jenis dan volume pelayanan serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah perencanaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pertanian, mempertahankan ciri kegiatan pertanian dalam wilayah perencanaan yang mempunyai potensi tanah subur sehingga sejalan dengan kebijaksanaan tingkat propinsi serta sejalan dengan fungsi Kabupaten Bantul sebagai penyangga pangan bagi Kota Yogyakarta;
- c. Sistem transportasi dan angkutan, mengembangkan sistem transportasi, baik untuk melayani pergerakan inter kawasan maupun pergerakan regional ke dan dari pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dimana perencanaan jaringan transportasi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas ke seluruh wilayah perencanaan dengan memberian pelayanan lokal dan regional yang

Tabel 4.
Lingkup spasial wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul

Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
1. Kretek	1. Tirtohargo	362.0000
	2. Parangtritis	1.878.2500
	3. Donotirto	47,2715
	4. Tirtosari	935,2796
2. Sanden	5. Srigading	757,6000
	6. Gadingsari	811,7430
	7. Gadingharjo	307,9250
3. Srandakan	8. Poncosari	1.186.1120

Sumber : RDTR Kawasan Pantai Selatan Kab. Bantul

Lingkup perencanaan makro meliputi 8 (delapan) desa yang ada di wilayah perencanaan disajikan dalam peta skala 1 : 12.500 sedangkan lingkup mikro meliputi tiga titik simpul kegiatan yang ada dalam cakupan wilayah penelitian tersebut yaitu pada wilayah Parangtritis, Samas dan Pandansimo yang disajikan disajikan dalam skala 1 : 5000.

Perencanaan kawasan pantai selatan mencakup kelompok aspek-aspek administrasi dan pengelolaan wilayah, kependudukan dan kemasyarakatan, fisik dan sumberdaya alam, perekonomian dan kegiatan usaha, serta sarana dan prasarana lingkungan.

Lingkup material Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Bantul dapat digariskan sebagai berikut:

- a. Deskripsi Rona awal wilayah;
- b. Analisis Arah Pengembangan;
- c. Rumusan-rumusan Rencana yang meliputi arahan-arahan
 1. Kebijaksanaan pengembangan penduduk;

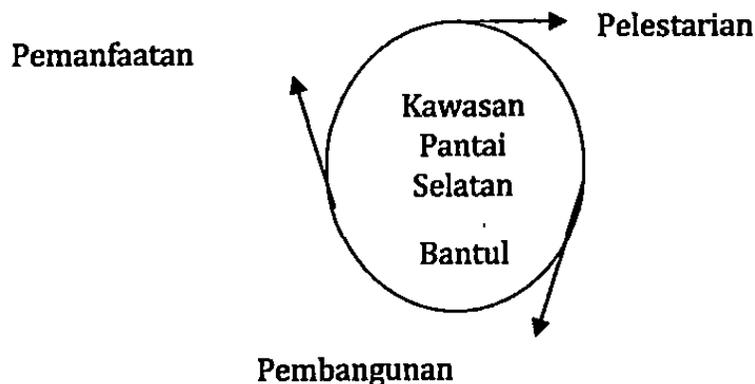
3. Rencana sistem jaringan prasarana;
4. Rencana kepadatan bangunan;
5. Rencana ketinggian bangunan;
6. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan.

Dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Bappeda Bantul berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan, yaitu:

- a. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
- d. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah pada dasarnya merupakan salah satu usaha untuk menata pola penggunaan ruang agar tercapainya perkembangan wilayah yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat dan aspek pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada fungsi kawasan pariwisata.

Azas yang diacu dalam penataan ruang Pantai Selatan Bantul adalah demokratisasi ruang, kesesuaian manfaat ruang, kelestarian, dan sinergi wilayah, dimana sinergi antara 3 aspek dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1.
Sinergi Antara Aspek Pelestarian, Pemanfaatan, dan Aspek
Pembangunan Kawasan pantai Selatan Bantul

Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kawasan Pantai Selatan Bappeda menyusun alternatif rencana yang diseminarkan yang meliputi:

a. Merumuskan tujuan pembangunan dan pengendalian tata ruang

b. Merumuskan kebijakan dasar rencana

- 1) Penentuan fungsi dan peranan kawasan;
- 2) Penentuan strategi dasar pertimbangan sektor-sektor kegiatan pembangunan sesuai pola dasar pembangunan daerah dan repelita daerah yang disesuaikan dengan perkembangan perkawasan;
- 3) Pengembangan tata ruang dalam hal penetapan struktur kawasan yang optimal dan pola interaksi pemanfaatan ruang;
- 4) Pengembangan fasilitas dan utilitas dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang akan ditingkatkan;
- 5) Kebijakan dalam hal jumlah dan kepadatan.

c. Rumusan Kebijaksanaan dasar rencana tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana-rencana fisik kawasan yang meliputi:

- 1) Pengembangan konsep kawasan yang direncanakan di masa yang akan datang dengan memberikan gambaran sketsa lokasi berupa komponen utama seperti pusat kawasan, pusat pelayanan, perumahan, jaringan jalan utama kawasan, kawasan industri, dan sebagainya. Konsep kawasan ini harus menggambarkan fungsi komponen-komponen kawasan.
- 2) Pengembangan rencana struktur tata ruang kawasan yang teratur dan menggambarkan pendapatan dan investasi tiap-tiap jenis penggunaan seperti : perumahan, bangunan pemerintah,

hijau, pelayanan transportasi dan pembangunan khusus seperti: industri, pergudangan, rekreasi dan pariwisata serta kemiliteran.

- 3) Rencana Pengembangan tiap bagian wilayah kawasan dan penetapan penggunaan lahan yang mencakup
 - a) Fungsi bagian wilayah kawasan;
 - b) Jumlah penduduk yang diperkirakan harus diwadahi;
 - c) Kawasan potensial yang diperkirakan dapat dikembangkan;
 - d) Struktur pengembangan fisik (rencana unit lingkungan dan pusat pelayanan);
 - e) Kepadatan bangunan dan penggunaan lantai bangunan;
 - f) Jenis dan kebutuhan ruangan bagi pengembangan sarana dan prasarana yang digambarkan secara gemetris.
- 4) Rencana Pengembangan Obyek khusus, merupakan rencana pengembangan yang lebih mendalam baik teknis maupun pengaruhnya yang meliputi :
 - a) Rencana Pengembangan lingkungan perumahan, termasuk program perbaikan, peremajaan dan sebagainya;
 - b) Rencana pengembangan lingkungan pusat lawasan, termasuk program perbaikan, pengembangan

- c) Rencana pengembangan sistem transportasi dan kawasan khusus lainnya, seperti reboisasi, pariwisata, perdagangan dan sebagainya.

5) Rencana Fasilitas dan Utilitas

- a) Jenis-jenis fasilitas untuk kegiatan sosial dan ekonomi;
- b) Penempatan dan lokasi fasilitas;
- c) Tingkat kemampuan pelayanan, fungsi dan sistem pelayanan;
- d) Jenis-jenis utilitas, kapasitas, dan jaringan induknya.

d. Setelah dijabarkan dalam rancangan rencana, kemudian dirumuskan pokok-pokok pelaksanaan pembangunan yang meliputi:

- 1) Tahapan pelaksanaan yang mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan pada setiap jangka waktu 5 tahun yang terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain
 - a) Prasarana dan sarana kawasan yang bersifat strategis yang perlu dilaksanakan pembangunannya, serta-sumber-sumber pembiayaannya;
 - b) Rencana detail yang perlu disusun serta program-program pembangunan yang meliputi jenis, lokasi dan besaran tiap-tiap program;
 - c) Cara pengelolaan prasarana dan sarana oleh pemerintah atau instansi lain dalam bentuk penanganan Dinas BUMD

- 2) Pembiayaan Pembangunan, yaitu merumuskan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan kawasan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.
- 3) Organisasi Pelaksana Pembangunan
 - a. Organisasi fungsional otonom dan vertikal yang bertanggungjawab penuh atas manajemen pelaksanaan rencana kawasan;
 - b. Personalia yang dilibatkan;
 - c. Kewenangan dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Hasil kegiatan rancangan rencana ini terdiri dari:
 - 1) Buku laporan yang berisi rencana kebijaksanaan dan pokok-pokok uraian rencana;
 - 2) Gambar-gambar rencana yang terdiri dari peta tata guna lahan dan gambar struktur kawasan serta peta wilayah lainnya yang meliputi : lingkungan permukiman, jaringan transportasi, sistem dan lingkungan pusat kawasan, sub pusat kawasan, peta jaringan utilitas lainnya.
- f. Sistem dan distribusi penyediaan kawasan sebagai perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga dan lain sebagainya;
- g. Sistem dan jaringan utilitas seperti: air minum, drainase, air limbah, telekomunikasi, listrik dan sebagainya;

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Bantul yang disusun berfungsi untuk memberikan arahan bagi:

1. Lokasi kegiatan dominan dan non dominan dari kawasan-kawasan yang diarahkan pada tingkat rencana yang lebih tinggi;
2. Penyusunan prioritas pengembangan kawasan permukiman;
3. Penyusunan program dan proyek prasarana;
4. Sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Agar fungsi tersebut memperoleh kekuatan politis, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Bantul, perlu dikukuhkan dengan Keputusan Bupati. Peran Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul adalah:

- a. Peran sebagai kawasan pariwisata dan lindung yang didukung oleh sektor kegiatan lainnya;
- b. Peran sebagai *hinterland* yang kuat untuk mendukung daerah yang ada di depannya.

Strategi pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul adalah pemanfaatan segala potensi sumberdaya secara maksimal, dengan pemanfaatan ruang yang optimal bagi berbagai kegiatan secara efisien dan berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi,

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BPBD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

VISI BPBD Kabupaten Bantul adalah "Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana".

Rumusan visi ini mengacu pada visi Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2011 (RPJMD Tahun 2011-2015). Di dalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi factor pendorong dan menarik (*pull* dan *push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan

mengembangkan konsep, regulasi dan *Standart Operasional Prosedur* (SOP), Protap penanggulangan bencana mulai dari tahapan Pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah:

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Bantul dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana.
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
3. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapabilitas/kemampuan aparatur serta sarana dan prasarana yang memadai;
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 3) Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam

- 4) Memantapkan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan pengembangan data/informasi di bidang lingkungan hidup.

Visi dan Misi BLH Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan BLH Kabupaten Bantul, visi BLH Kabupaten Bantul adalah:

"Terwujudnya Bantul yang bersih, sehat, sejuk dan lestari melalui BLH sebagai Instansi yang proaktif di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Bersih disini juga mengandung estetika artinya disamping pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar juga indah dipandang mata. Sehat artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang penyakit. Sejuk artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh pepohonan rindang yang tumbuh dan terpelihara dimana-mana. Lestari artinya tetap terjaganya alam sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Bantul. Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya diperlukan misi. Adapun misi BLH sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 2) Mewujudkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

- 3) Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Mengatasi Ancaman Abrasi di Kawasan Pantai Selatan

1. Perencanaan Penanganan Abrasi

Dalam menentukan kegiatan pengamanan, prioritas akan diberikan kepada perlindungan dan pengamanan yang menyangkut tingkat kepentingan yang paling tinggi yaitu yang berkaitan dengan jiwa dan perekonomian daerah yang vital.

Rencana penanganan abrasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Karakteristik sosial ekonomi budaya masyarakat dan kondisi lingkungan serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan abrasi adalah dengan melakukan perencanaan penanganan abrasi sebagai berikut:

a. Penanganan metode *hard structure*

Penanganan metode *hard structure* adalah penanganan abrasi dengan membangun struktur penahanan gelombang untuk perlindungan pantai. Metode *hard structure* memiliki keunggulan dimana hasilnya dapat dengan cepat diketahui ketika struktur telah selesai dibangun. Jenis

1) Dinding Pantai atau *revetment*

Revetment adalah bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai, yang terutama berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang (*overtopping*) ke darat. Dinding pantai di bagi menjadi dua, yaitu dinding pantai tumpukan batu dan dinding pantai masif. Kelemahan bangunan ini adalah kemungkinan terjadinya penggerusan yang cukup dalam di kaki bangunan, sehingga dapat mengganggu stabilitas bangunan.

Dinding pantai dibagi menjadi dua, yaitu dinding pantai tumpukan batu dan dinding pantai masif.

a) Dinding Pantai Tumpukan Batu

Pemakaian dinding pantai biasanya dipergunakan untuk melindungi fasilitas yang berada dibalik bangunan tersebut dari gempuran gelombang. Konstruksi tumpukan batu (untuk dinding pantai mempunyai banyak keuntungan diantaranya adalah: dapat meredam energi gelombang, mempunyai bidang kontak dengan tanah dasar yang luas sehingga tidak membutuhkan kondisi tanah dasar yang prima, konstruksi relatif murah (bilamana material batu tersedia di sekitar lokasi pekerjaan) dan pembangunan relatif mudah. Kekurangan dari

Dinding pantai dengan tipe ini biasanya digunakan untuk melindungi fasilitas yang berada pada lahan relatif rendah, dan dapat berada di bawah muka air. Oleh karena itu dinding pantai harus kedap air. Dinding pantai tipe ini biasanya dibuat pada tanah dasar yang relatif lunak, sehingga pemakaian konstruksi yang berpondasi luas sangat cocok, seperti dinding pantai dengan lapis lindung tumpukan batu. Konstruksi dinding pantai ini bagian dalamnya harus berupa material kedap air, sehingga air tidak dengan mudah lolos lewat tanggul. Kekurangan dari dinding pantai ini adalah potensi erosi yang terus berlanjut karena penggerusan dan kesalahan struktur. Bangunan ini juga menghentikan proses alami pertumbuhan pantai.

b) Dinding Pantai Masif

Pemakaian dinding vertikal untuk dinding pantai mempunyai keuntungan, diantaranya yaitu pemakaian material relatif sedikit. Dinding vertikal dapat sekaligus dipergunakan untuk dinding penahan tanah dan bangunan di belakangnya. Hanya saja untuk membangun dinding vertikal ini diperlukan persyaratan tanah dasar (pondasi) yang cukup baik, supaya bangunan tidak mengalami penurunan yang besar dan penurunan tidak merata. Pemakaian dinding pantai masif dengan dinding vertikal harus mempertimbangkan gelombang

seluruh energinya akan dipantulkan kembali. Sehingga perlu dipertimbangkan arah dan besar gelombang refleksi (pantulan) ini apakah dapat merusak daerah lain atau mengganggu kegiatan/aktivitas daerah lain. Apabila gelombang refleksi ini mengganggu daerah lain harus dipertimbangkan pemakaian bangunan tambahan atau pemilihan dinding pantai dengan tipe yang lainnya.

Keuntungan tembok masif berdinding miring adalah mempunyai lebar pondasi yang cukup, sehingga struktur mempunyai bidang kontak dengan tanah dasar cukup luas. Kondisi ini dapat mengurangi persyaratan daya dukung tanah dasar. Kelemahan dinding miring ini terutama adalah tingginya rayapan gelombang yang terjadi, sehingga membutuhkan mercu bangunan yang telatif tinggi. Untuk mengatasi kelemahan ini maka mercu dinding pantai dilengkapi dengan alat pemantul gelombang (*wave reflector*). Dengan adanya *wave reflector*, gelombang akan dipantulkan kembali ke laut, dan tidak mengganggu fasilitas yang berada di balik tembok.

Perkembangan teknologi dinding pantai terus mengalami kemajuan. Kini muncul dinding pantai yang dengan teknologi yang memiliki keunggulan:

1. Memperkecil gaya dorong gelombang dengan sistem pendistribusian gaya sistematis

2. Memperkecil gaya *uplift* dengan lubang pelepas tekanan
3. Menggunakan satu lapis pelindung karena hemat
4. Memilih bentuk unit pelindung pejal ukuran kecil
5. Kesatuan rangkaian dinding mencegah menggelingnya unit terhadap getaran kuat dari gempa, sampai pada batas kekuatan konektornya.
6. Mempunyai nilai estetika indah karena kerapihan pengaturannya

c) Bangunan Pengubah Laju Angkutan Sedimen Sejajar Pantai

Cara ini cukup efektif ada pantai yang akan dinamakan berupa pantai pasir seperti Pantai Kuwaru. Untuk merubah laju angkutan sedimen sejajar pantai dapat dilakukan dengan mengatur atau mengurangi *longshore transport*. Tugas utama bangunan ini adalah menangkap dan membatasi gerakan sedimen sepanjang pantai. Kelemahan sistem groin adalah terjadinya erosi di bagian hilir (*down drift*) groin, sehingga untuk melindungi suatu pantai secara menyeluruh harus dipertimbangkan sejauh mana garis pantai harus dipasang groin tersebut.

d) Bangunan Pengurangan Energi Gelombang Yang Mengenai Pantai

Pengurangan tenaga gelombang yang menghantam pantai dapat dilakukan dengan membuat bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwater*). Dengan adanya bangunan ini

suatu tempat yang agak jauh dari pantai, sehingga energi gelombang yang sampai di pantai cukup kecil. Pemecah gelombang ini dapat berupa bangunan menonjol ke permukaan air ataupun bangunan bawah air. Di samping itu pemecah gelombang ini dapat pula berupa bangunan terapung (*floating breakwater*) namun hal ini jarang dilakukan.

Apabila gelombang pemecah gelombang berupa konstruksi bawah air, perlu dipertimbangkan dengan seksama besarnya gelombang yang masih diteruskan apakah masih cukup besar sehingga masih mampu menimbulkan kerusakan di pantai.

b. Penanganan metode *soft structure*

Penanganan abrasi metode *soft structure* adalah penanganan abrasi yang lebih mengarah pada proses alami tanpa rekayasa teknologi struktur/bangunan. Penanganan abrasi dengan metode ini lebih ramah lingkungan namun membutuhkan waktu yang lama. Ada beberapa alternatif penanganan abrasi dengan menggunakan metode *soft structure*, yaitu:

1) Tanggul karung pasir (*geotextile*)

Perencanaan dan pembangunan dinding pantai memerlukan waktu yang tidak singkat sedangkan abrasi Pantai Kuwaru terus berlangsung. Penanganan darurat yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju abrasi adalah dengan membangun dinding pantai dari karung berisi pasir

sementara sebelum rencana penanganan abrasi jangka panjang mulai dilaksanakan.

2) Revegetasi

Revegetasi kawasan pantai bertujuan untuk menciptakan hutan pantai sebagai barrier alam. Hutan pantai memiliki fungsi sebagai peredam gelombang tsunami, mereduksi terjadinya pengontrol siklus air dan intrusi air laut.

Kegiatan revegetasi pernah dilakukan di kawasan pantai di Ciamis, dengan model desain jalur hijau sempadan pantai sebagai berikut:

a) Model untuk lokasi di dalam kawasan wisata.

Model ini dirancang khusus untuk jalur hijau yang berada di dalam obyek wisata dengan pertimbangan utama dari segi estetika/keindahan tampilan pohon, landscape, kenyamanan dan perlindungan.

b) Model untuk lokasi di luar kawasan wisata

Dalam penetapan model-model tersebut, jalur tanaman ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan tajuk yang berlapis dimana tanaman dengan tajuk rendah ditepatkan paling depan dan makin kebelakang tajuknya semakin tinggi yang berfungsi untuk memecahkan gelombang pasang dan penyanggah arus balik. Berbagai species tanaman pantai yang dirancang untuk

pandan antara lain pandan laut (*P. Tectorius*), pandang wong (*Pandanus sp*), jenis semak dan pohon antara lain keben (*B.asiatica*), ketapang (*T. Catapa*), waru laut (*H.tiliacerus*), borongondolo (*H.peltata*), nyamplung (*C. Inophylum*), cemata laut (*C. Equisetifolia*), kepala (*C.nucifera*) serta berbagai tanaman kayu dan buah buahan lain yang sesuai untuk kondisi pantai. Salah satu jenis tanaman yang saat ini digunakan dalam konservasi pantai di kawasan pesisir Bantul dan Kulonprogo adalah cemara laut dan cemara udang.

Jalur penyangga merupakan jalur yang berada di belakang jalur inti. Jalur ini merupakan pendukung jalur inti namun masih dapat dimanfaatkan penduduk untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman kehutanan dan buah-buahan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pantai.

Pelaksanaan revegetasi pantai seringkali terkendala beberapa masalah, yaitu jenis tanaman yang sesuai untuk kondisi lahan pantai dengan ekosistem pasir merupakan lahan yang sangat marginal dan umumnya spesies pantai belum merupakan spesies yang komersial sehingga pembibitannya belum diusahakan dalam skala besar.

Alternatif-alternatif penanganan abrasi yang telah dijabarkan memiliki keunggulan dan kekurangan. Revegetasi merupakan alternatif yang berbasis lingkungan sehingga dampak pelaksanaan seperti

pantai dapat dikurangi. Metode revegetasi juga mendukung rencana tata ruang kawasan Kuwaru yang diarahkan menjadi kawasan konservasi serta kawasan wisata namun penanganan abrasi dengan metode revegetasi memerlukan waktu yang lama agar dapat efektif mengurangi abrasi yang terjadi.

Metode Revegetasi perlu dikombinasikan dengan metode lain. Penanganan sementara dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan metode *soft structure* seperti pembangunan tanggul dari karung *geotextile*. Kombinasi metode ini memiliki keuntungan dalam segi biaya dan pelaksanaan. Namun, karung *geotextile* bersifat jangka pendek sehingga perlu perawatan berkala yang intensif.

Metode revegetasi dapat dikombinasikan dengan metode *Hard structure* pembangunan dinding pantai dapat membantu mengamankan bagian mukai pantai sehingga vegetasi yang ditanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal ini cocok diterapkan pada pantai yang mengalami abrasi parah. Pemilihan jenis dinding pantai diupayakan yang memiliki ukuran blok penahan gelombang yang kecil sehingga pengaturannya mudah dan menjadi estetika pantai. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan wisata di Pantai.

Perencanaan penanganan abrasi Pantai Selatan yang dijabarkan disini adalah penanganan berbasis lingkungan yaitu metode revegetasi.

panjang tanpa merusak dinamika dalam pesisir serta dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Rencana tata ruang kawasan konservasi bertujuan untuk menata kawasan sempadan pantai sebagai kawasan inti konservasi yang dapat menjadi kawasan perlindungan dari abrasi, serangan angin dan tsunami. Kawasan konservasi juga diperuntukkan sebagai kawasan wisata alam. Rencana tata ruang konservasi di sini lebih pada pengaturan jenis tanaman yang akan digunakan untuk revegetasi dan konservasi tanah. Batas zona konservasi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Rencana zonasi dibuat berdasarkan peranan masing-masing tajuk. Tanaman jenis maupun alur penanamannya disusun dan ditata sehingga secara berlapis berperan sebagai penyangga daerah sekitarnya dan berfungsi sebagai pemecah gelombang. Pengaturan tanaman, juga mempertimbangkan estetika mengingat kawasan Pantai Selatan adalah kawasan pariwisata sehingga kawasan pantai tetap memiliki kawasan pantai tetap memiliki daya tarik dan keindahan.

Pengelompokkan (zonasi) tanaman yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Zona I

Zona I merupakan kelompok tanaman yang berhadapan langsung dengan laut. Pada strata ini tatanan yang direncanakan adalah pandan laut serta *Ipomea pescaprae* serta pandan laut. Formasi *Ipomea*

pascaprae toleran terhadap kondisi yang ekstrim dan mampu mengikat pasir karena memiliki akar yang panjang.

Pandan laut dapat berkembang pada substrat berpasir di depan garis pantai, terkena pasang surut hingga agak ke belakang garis pantai. Pandan berfungsi sebagai penahan erosi karena akarnya panjang dan mampu berkembang sampai lapisan dalam.

Barisan pandang laut ditanam di bagian paling luar pantai dengan lebar 2,5 meter pada bagian sisi barat dan timur Pantai Kuwaru. Bagian tengah tidak dilakukan penanaman karena pada zona tengah merupakan zona sirkulasi kegiatan di Pantai Kuwaru seperti wisata dan kegiatan perikanan tangkap.

b. Zona II : Cemara Udang (*Casuarine equisetifolia*)

Zona II merupakan lapisan kedua dari zona konservasi. Pada zona ini diutamakan tanaman yang mampu menahan hembusan angin serta memiliki fungsi sebagai rehabilitasi lahan. Cemara udang merupakan tanaman yang toleran terhadap air garam, tanah berkapur dan agak alkali serta sangat mudah beradaptasi pada tanah kurang subur, cemara udang dapat menghambat N_2 dari atmosfer sehingga dapat meningkatkan unsur hara tanah. Cemara udang berfungsi sebagai tanaman penghijauan untuk melindungi daerah dibelakangnya dari hembusan angin kencang, erosi pasir serta kadar garam.

Penanaman cemara udang dilakukan sepanjang kawasan Pantai Kuwaru dengan lebar 30 meter. Pada zona ini akan dikembangkan wisata

Dalam pelaksanaan revegetasi kawasan Pantai Selatan sebagai upaya untuk menahan laju abrasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan

Dalam pelaksanaan pekerjaan revegetasi Pantai Selatan dilakukan beberapa tahapan antara lain :

1. Pekerjaan awal meliputi sosialisasi, persiapan dan pembersihan lahan pengukuran lahan, pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan.
2. Mobilisasi tenaga manusia (diutamakan tenaga lokal) untuk penyempurnaan dalam proses langsir tanah urug dan bibit tanaman serta penanaman.

b. Pengadaan Bibit dan Pupuk

Pengadaan bahan-bahan pertanian (bibit tanaman dan pupuk) termasuk langsir. Adapun bibit tanaman dan pupuk yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bibit Pandan Laut sejumlah 820 batang;
2. Bibit Cemara Udang sejumlah 1700 batang;
3. Bibit Waru sejumlah 20 batang;
4. Bibit Ketpang sejumlah 220 batang;
5. Pupuk Organik kurang lebih 880 kg (per lubang tanam diberi 3 Kg pupuk organik); Pupuk Urea sejumlah 148 Kg : Pupuk TSP

c. Penyiapan dan Pembuatan Lubang Tanam

Penyiapan dan pembuatan lubang tanam (spasi penanaman) disesuaikan dengan jenis tanaman. Pada pembuatan lubang tanam sekaligus dipasang air sebagai tanda untuk tiap-tiap tanaman. Lubang tanam dibuat 40 x 40 x 40 cm, pada lubang tanam ini juga diberi pupuk organik yang dicampur sekam sebanyak 3 kg per lubang tanam. Rendahnya ketersediaan hara karena porositas dan permeabilitas yang tinggi pada tanah di Pantai Kuwaru membutuhkan pemupukan secara organik agar tanaman yang akan dibudidayakan dapat bertahan dan tumbuh dengan baik. Kegiatan ini dapat dilanjutkan pada masa pemeliharaan.

d. Penanaman

Tanaman yang akan ditanam pada teras dan spasi penanaman adalah sebagai berikut :

1. Bibit Pandan Laut dengan spasi penanaman 2,5 m. Penanaman dilakukan dengan pola menyilang silang,
2. Bibit Cemara Udang di zona II dengan spasi penanaman 4. Jarak tanaman antar baris juga 4 meter dengan posisi sejajar. Batang bibit cemara biasanya lentur, sementara lokasi penanamannya seringkali di pinggir pantai yang tiupan anginnya kencang. Agar posisi bibit tegak dan stabil, sebaiknya bibit diikat pada dua titik, yaitu bawah dan atas. Apabila hanya diikat di bagian bawah saja, maka posisi

tiupan angin di pantai, tiang air sebaiknya ditancapkan cukup dalam dan terbuat dari tonggak yang kuat. Sering dijumpai di lapangan, pohon cemara yang bahkan tingginya telah mencapai 3 meter tumbang akibat terpaan angin. Untuk mengatasi hal ini perlu dipasang tiang penopang/penyangga agar pohon cemara muda ini tidak mati.

3. Bibit Cemara Udang, Waru dan ketapang dengan spasi penanaman 5m. Lokasi yang sesuai untuk ditanami ketapang adalah lokasi tanah berpasir atau tanah mineral. Ketapang termasuk jenis tumbuhan yang menyukai sinar matahari dan tidak tahan terhadap genangan air. Oleh karena itu, lokasi penanaman sebaiknya terbuka dan kering (tidak tergantung) serta dilakukan pada musim penghujan, tepatnya sore hari. Mengingat jenis ini memiliki tajuk yang lebar maka penanamannya sebaiknya dilakukan dengan jarak tanam 5 x 5 m.

Waru sangat sesuai ditanam di daerah pesisir, terutama pada tanah berpasir, bahkan di atas lahan pasir yang terbuka sekalipun. Jenis ini mampu tumbuh dengan baik walaupun ditanam dalam jarak tanam yang rapat, selain sebagai tanaman pagar dan peneduh di tepi pantai, Waru sering ditanam untuk tujuan estetika. Untuk

2. Penanaman Cemara Udang di Pantai Selatan

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Lingkungan Hidup Bantul menanam 1000 pohon cemara udang di kawasan Pantai Depok, Kuwaru, yang ada di kawasan Pantai Pandansimo, Kecamatan Kretek. Cemara udang dipilih karena cocok dan dapat tumbuh di kawasan pesisir berpasir tersebut. Penanamannya dilakukan berselang-seling dengan tanaman pohon pandan.

Menurut keterangan Bapak Tri Wahyu Heriyono, Sekretaris BLH Bantul,

“Penanaman pohon cemara udang dan penanaman pohon pandan yang sangat cocok untuk ditanam di lahan yang berpasir, diharapkan dengan penanaman pohon cemara udang, pandan, dan juga bakau ini dapat mencegah abrasi.³²



Gambar 5.

Penanaman Pohon Cemara di Pinggir Pantai Samas, Bantul.

Pantai Kuwaru sedang banyak dikunjungi wisatawan maka langkah awal untuk mencegah abrasi adalah dengan menanam kembali pohon cemara udang. Potensi wisata di Pantai Kuwaru sangat besar dan mampu

³² Tri Wahyu Heriyono, Sekretaris BLH Kabupaten Bantul

memasok PAD dari sektor pariwisata terbesar kedua setelah pantai Parangtritis sehingga langkah penanggulangan abrasi harus segera dilakukan.

3. Relokasi Warga yang terkena Abrasi

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengupayakan hunian warga di Pantai Samas yang direlokasi akibat rumahnya rusak diterjang gelombang pantai aman dari abrasi. Solusi paling tepat untuk menangani abrasi itu dengan merencanakan semua bangunan aman dari terjangan gelombang pantai. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul gelombang tinggi di Pantai Samas menyebabkan 12 kepala keluarga (KK) warga setempat harus mengungsi karena tempat tinggal rusak akibat abrasi. Namun dalam beberapa hari selanjutnya gelombang tinggi pantai Samas belum juga surut hingga akhirnya jumlah warga yang mengungsi bertambah menjadi 15 KK dengan total sekitar 75 jiwa.

Untuk mengupayakan hunian baru untuk relokasi warga tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia mengatakan, setidaknya ada dua titik lokasi yang perlu dikaji untuk merelokasi bagi korban abrasi Pantai Samas, lokasi tersebut direncanakan

di lokasi yang aman dan lokasi relokasi lainnya di

4. Sosialisasi Tanggap Bencana

Untuk mencegah terjadinya bencana Pemerintah Kabupaten Bantul melalui BPBD mengadakan sosialisasi resmi yang melibatkan seluruh perwakilan masyarakat dan kelompok di Desa Poncosari. Dwi Daryanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, mewakili BNPB menyampaikan bahwa:

Potensi bencana di Desa Poncosari cukup banyak. Keberadaan lempeng tektonik di Pesisir Selatan Jawa yang senantiasa bergeser berpotensi untuk menimbulkan gempa bumi, termasuk disertai tsunami. Sedangkan fenomena cuaca yang berpotensi bencana yang sering terjadi di Bantul adalah angin kencang, apalagi daerah tepi Pantai Selatan yang juga dipengaruhi perubahan cuaca di Australia. Fenomena pemanasan global, saat ini bencana tidak hanya gempa bumi, banjir, angin topan, tapi juga perubahan iklim.³³

Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut. Tak heran jika abrasi di pantai-pantai Poncosari semakin hari semakin jauh menghajar daratan. Dan bagi masyarakat nelayan pemanasan global bisa memicu migrasi hewan laut yang bisa memengaruhi hasil tangkapan sehari-hari. Karena ketika wilayah tropis semakin panas, hewan laut cenderung memilih habitat yang lebih dingin mengarah ke kawasan sub-tropis.

Dengan banyaknya potensi bencana di Desa Poncosari, pemerintah melalui BNPB pun berkewajiban menyiapkan warganya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa merugikan masyarakat. Penetapan gelar “Desa Tangguh Bencana Utama” oleh BNPB bagi Desa Poncosari tak akan banyak membantu jika warga tidak dibekali pengetahuan adaptasi dan mitigasi. Hal ini

³³ Wawancara dengan Bapak Dwi Daryanto selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana

menjadi PR utama BNPB, BPBD, dan pemerintah desa untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan pengurangan resiko bencana.

C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Pantai Selatan

1. Faktor yang Mendukung

- a. Adanya Keputusan Pemerintah untuk mendorong agenda pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah dikeluarkannya UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut menetapkan sasaran pembangunan yang lebih berkelanjutan melalui pencapaian keseimbangan antara: Pembangunan ekonomi, pemanfaatan wilayah pesisir, perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir, minimalisasi kerugian kehidupan manusia dan harta benda dan akses publik di zona pesisir. Selain itu Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, juga mendukung penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang baru terbentuk pada tahun 2010 akan lebih menjamin tertanganinya isu penanggulangan bencana khususnya terkait abrasi di Pantai Selatan dan isu terkait lainnya dengan baik.
- c. Dukungan masyarakat terhadap kawasan pantai dengan menanam pohon

dicanangkan pemerintah serta untuk mencegah abrasi pantai akibat ombak laut. Seperti yang dilakukan oleh karyawan Beacukai Yogyakarta yang melakukan penanaman 100 pohon cemara udang di Pantai Samas. Selain itu penanaman pohon juga dilakukan oleh Danlanal Yogyakarta, Kolonel Laut (E) Antar Setyabudi menanam pohon cemara udang, di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, Penanaman 10 ribu pohon cemara udang di kawasan pantai DIY tersebut dalam rangka ikut berpartisipasi program 1 milyar pohon yang dicanangkan pemerintah serta untuk mencegah abrasi pantai akibat ombak laut.



Gambar
Penanaman Pohon Cemara Udarang oleh Danlanal Yogyakarta

Dukungan terhadap bencana abrasi juga diberikan oleh Dandim 0729 Bantul Letkol Kav Dedy Setiawan Ssos dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan Karya Bhakti dalam rangka Diponegoro Bersih dan memperingati Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-182, juga sebagai wujud kepedulian

dan masyarakat TNI AD dalam kegiatan pembinaan teritorial TNI

AD. Karya bhakti skala besar pasca bencana alam abrasi di Pantai Samas ini, juga merupakan kelanjutan masa tanggap darurat yang sudah dilaksanakan, namun masih perlu pembenahan serta pembersihan sisa-sisa dampak bencana.

2. Faktor yang Menghambat

a. Faktor Sumber Daya Alam

Wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY yang berkisar antara 2,25 m – 3,30 m dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas, dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai

b. Faktor Anggaran

Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto mengatakan bahwa:

Pemkab tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan bencana alam. Selama ini BPBD Bantul selalu bertumpu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bupati jika, warga yang kena dampak bencana alam membutuhkan bantuan. Sehingga mekanisme pencarian dana dilakukan setelah terjadi sebuah bencana.³⁴

Berdasarkan rekomendasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) DIY mempunyai dua alternatif penanganan abrasi di Selatan yakni dengan membangun pemecah gelombang di tengah laut dan penguatan tebing di sepanjang pantai. Kedua alternatif ini memerlukan anggaran yang besar dan studi yang lebih lanjut. Sedangkan pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk menangani bencana abrasi. Sumber dana dari Pemerintah Pusat dimana Komisi V DPR berjanji menggelontorkan dana Rp 200 miliar untuk mengatasi dampak abrasi yang terjadi di pantai selatan DIY. Kemungkinan besar, dana tersebut akan digunakan untuk mengatasi masifnya abrasi baik di Pantai Kuwaru, Pantai Samas ataupun Pantai Depok.

c. Kurangnya Koordinasi dalam Penanganan Abrasi

Tidak ada koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD dalam mengatasi abrasi di Pantai Selatan, hal ini karena abrasi

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dwi Daryanto selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana

merupakan kategori bencana alam, karena itu penanganannya diperlukan koordinasi dari Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat.

- d. Belum tersedianya peta risiko bencana dalam skala kecil yang diperlukan untuk penanganan masalah abrasi. Meskipun peta abrasi telah dibuat dalam skala nasional, namun sayangnya masih belum tersedia peta dalam skala kecil (1:500).
- f. Orientasi kelembagaan kebencanaan sebelum ini banyak berorientasi pada penanganan kedaruratan, belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Tampaknya pemahaman dan kesadaran bahwa risiko bencana dapat dikurangi melalui intervensi-intervensi pembangunan masih minim. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang telah merubah paradigma penanggulangan bencana dari *responsif* (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke *preventif* (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terlihat pada program-program pengurangan risiko bencana.
- g. Rendahnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Bencana alam yang terjadi dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan selama bertahun-tahun oleh kelompok masyarakat. Hal ini tentunya merupakan sebuah pukulan berat bagi masyarakat yang terkena bencana tersebut.
- h. Penerapan teknologi di bidang mitigasi bencana belum optimal. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

lembaga riset dan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian-penelitian, ilmu dan teknologi kebencanaan.

D. Analisis

Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi ancaman abrasi di kawasan Pantai Selatan dilakukan dengan revegetasi kawasan pantai bertujuan untuk menciptakan hutan pantai sebagai barrier alam dengan membagi berdasarkan tiga zona yaitu Zona I merupakan kelompok tanaman yang berhadapan langsung dengan laut. Pada strata ini tatanan yang direncanakan adalah pandan, Zona II merupakan lapisan kedua dari zona konservasi dengan menanam 1000 pohon Cemara Udang. Cemara udang berfungsi sebagai tanaman penghijauan untuk melindungi daerah dibelakangnya dari hembusan angin kencang, erosi pasir serta kadar garam. Zona III merupakan tanaman campuran. Langkah lainnya adalah dengan merelokasi warga di Pantai Samas yaitu 15 kepala keluarga (KK) dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang wilayah pantai tentang jarak rumah hunian dengan bibir pantai minimal 200 m.

Menurut penulis penanganan abrasi di Pantai Selatan dilakukan untuk tujuan jangka panjang, sedangkan secara jangka pendek dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemecah ombak dan pembangunan tebing tetapi pemerintah Bantul terkendala anggaran untuk pemasangan alat pemecah

Faktor yang mendukung dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bantul adalah adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, adanya dukungan masyarakat terhadap kawasan pantai dengan menanam pohon cemara udang dalam mendukung program 1 milyar pohon yang dicanangkan pemerintah serta untuk mencegah abrasi pantai akibat ombak laut. Sedangkan faktor yang menghambat adalah orientasi kelembagaan kebencanaan sebelum ini banyak berorientasi pada penanganan kedaruratan, belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Rendahnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana serta penerapan teknologi di bidang mitigasi bencana belum dilakukan secara optimal